JURNAL FAIRNESS
ISSN (print):
ISSN (online):
Available online at https://ejournal.unib.ac.id/fairness

# EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI BENGKULU

**[1]Yunita Asriyana Sari [2]Abdullah**
**[1,2]Universitas Bengkulu**

ARTICLE INFO

***Article history:***
Received: 26 Maret 2022
Revised: 26 Maret 2022
Accepted: 26 Maret 2022

***Keywords***:
*Region Restribution, the ways of taking region restribtion, and region equipment organization.*

***Correspondence:***
Abdullah
Universitas Bengkulu
abdullah@unib.ac.id

ABSTRACT

*The title of this research is "Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu". The objective of this research was taking the description about region retribution in Bengkulu city. The significance of this research was giving the information in the affectivities of taking region retribution on the OPD in Bengkulu province and can add the knowledge about the taking region retribution on the OPD in Bengkulu province. For the academician, it could be the reference and consideration to increase the income and have the new potential in the region retribution sector toward the income of Bengkulu province and this research could become a reference for the advance research. The methodology of this research was qualitative research. This research had been done since January 2019 up to Juny 2019 as the location survey, collecting the data, and analysis data. This research had been done to some of government instances in the Bengkulu province. The technique of collecting data was by using interview, observation, and documentation. Based on the analysis which had been done, so the result was the taking of region retribution in this province was effective. The factors those made this was; the official on the related instances was sufficient; there was involvement of the leader in each*

*instances actively controlled the activities of taking region retribution in Bengkulu province; there was cooperative as team so that the instances did not have problem in reporting and storing of the region retribution in the related instances. Based on the research results, so the researcher suggested that for the Badan pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, it would be better to increase the monitoring by checking suddenly or period, increase the monitoring processes, giving punishment for them those always arrear in storage their duty then increase the tax payment and the service which was given by the government instances. The further researches were suggested to take new side of the region retribution implementation and the quality of service by involving some of variables, such as the involvement management by involving government instances which more extensive in the Bengkulu province.*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah inilah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya wujud keuangan negara pada pemerintah pusat hampir sama dengan wujud keuangan negara pada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan negara pada pemerintah pusat yang sama dengan komponen atau klasifikasi aset, utang, ekuitas, belanja dan pembiayaan daerah pada pemerintah daerah. Namun, perbedaannya terletak pada struktur pendapatan antara pendapatan negara dan pendapatan daerah. Jika komponen pendapatan negara pada pemerintah pusat yang tergambarkan dalam APBN terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan hibah, berbeda dengan komponen pendapatan daerah sebagaimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Bengkulu sebagai provinsi yang sedang berkembang tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah adalah Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pengertian Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Adapun untuk pemungutan retribusi Daerah di Provinsi Bengkulu dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Laju pertumbuhan retribusi daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2015-2018 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang sangat kecil. Pada tahun terakhir (2018) retribusi jasa umum mengalami kenaikan persentase laju pertumbuhan sebesar 15,4% dan penurunan persentase laju pertumbuhan terjadi pada jenis retribusi jasa usaha sebesar 3,6% dan retribusi perizinan tertentu sebesar 20,43% pada tahun 2018.

Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi pada dinas pengelola keuangan daerah kota Bengkulu) oleh Putra (2012). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Bengkulu selama periode 2008-2012 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010-2012. Selama periode tersebut, kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang dengan rata-rata sebesar 12,5%. Setelah adanya pengurangan jenis retribusi yang disesuaikan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, jenis retribusi jasa umum mengalami penurunan kontribusi yang cukup besar. Pada jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan juga kurang dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu." Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang dapat diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah diProvinsi Bengkulu

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *2.1 Pengertian Efektivitas*

Faktor Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan hasil/dampak (outcome) dengan keluaran (output). Menurut Mahmudi (2007:102) Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome denga output, maksudnya adalah mengukur tingkat hasil akhir (tujuan) yang dicapai suatu program dari sejumlah output tertentu, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, akan semakin efektif kinerja program atau kegiatan yang bersangkutan..

### *2.2 Pendapatan Asli Daerah*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 (Bab 1 Pasal 1 Nomor 13 : 4), Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan (Bab 1 Pasal 1 Nomor 13 : 4), Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yuwono (2005) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### *2.3 Retribusi Daerah*

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Bab I, Pasal 1 ayat 64 UU RI Nomor 28 Tahun 2009:9). Disini terlihat jelas perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung kepada pembayar retribusi.

### *2.4 Efektivitas Pemungutas Retribusi Daerah*

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pasal 1) mengatur bahwa Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

***2.5 Kerangka Analisis***

Etika Untuk sebagai dasar atau landasan yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih terarah maka penulis membuat kerangka analisis sebagai berikut :

Gambar 2. : Kerangka Analisis

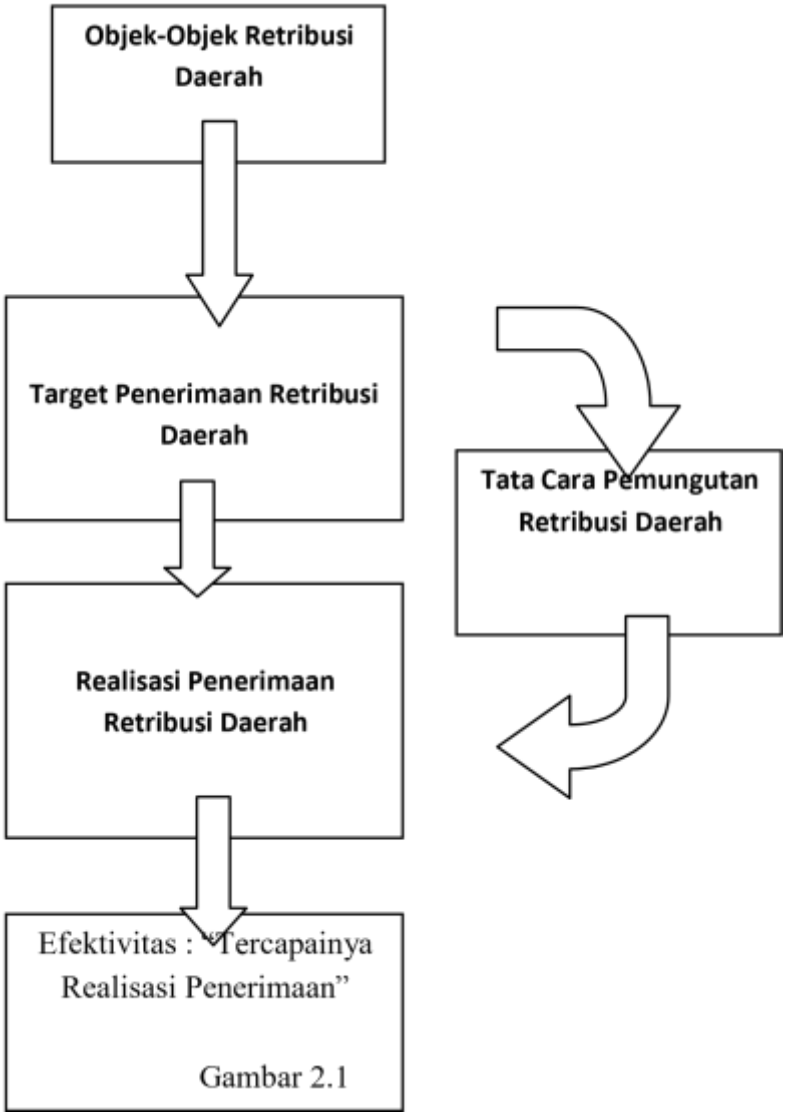


Gambar 2.1

## 3. METODE PENELITIAN

### *3.1 Instrumen penelitian*

Instrumen penelitian merupakan alat ukur seperti daftar pertanyaan wawancara, pedoman wawancara dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandas-kan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

### *3.2 Teknik Pengumpulan Data*

Variabel Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidakakan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

   Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 2014, 186). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016: 233).
2. Observasi

   Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2010). Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014: 174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam

penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

3. Dokumentasi
   Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, skesta dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *4.1 Hasil Penelitian*

Hasil Penelitian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

**Tabel 1**
**Target dan Realisasi Penerimaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 42.500.000,00 | Rp 49.500.000,00 | 116.47 % |
| 2. | 2016 | Rp 80.000.000,00 | Rp 75.500.000,00 | 94.38% |
| 3. | 2017 | Rp116.000.000,00 | Rp118.230.000,00 | 101.92% |
| 4. | 2018 | Rp 99.500.000,00 | Rp123.596000,00 | 124.22% |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp109.800.000,00 | Rp 63.372.500,00 | 57.72 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Dari data yang sudah didapat pada tabel 4.1 di atas, maka bisa dilihat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu peningkatan yang lumayan baik dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya, namun dalam hal penerimaan retribusinya terjadi peningkatan jumlah realisasi dari tahun ke tahun, peningkatan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana peningkatan tersebut dapat mempengaruhi target retribusi daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

**Tabel 2**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Dinas Sosial Provinsi Bengkulu**
**Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | 100.00 % |
| 2. | 2016 | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | 100.00 % |
| 3. | 2017 | Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 | 100.00 % |
| 4. | 2018 | Rp 6.030.200,00 | Rp 1.650.000,00 | 27.36 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 6.700.000,00 | Rp 450.000,00 | 6.67 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.2 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu perbandingan peningkatan antara target dengan realisasinya bisa dikatakan baik dari tahun 2015 ke tahun 2017. Dari data tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian retribusi daerah dilihat dari tahun 2017 sampai 2018 tingkat pencapaian realisasi mengalami penurunan dikarenakan besarnya target penerimaan yang ditetapkan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

**Tabel 3**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu**
**Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 25.146.653,00 | Rp 56.853.500,00 | 226.09 % |
| 2. | 2016 | Rp 24.054.771,00 | Rp 29.590.000,00 | 123.01% |
| 3. | 2017 | Rp1.350.121.000,00 | Rp 721.537.200,00 | 53.44 % |
| 4. | 2018 | Rp 832.441.385,00 | Rp 176.966.660,00 | 21.26 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 832.441.385,00 | Rp 60.194.260,00 | 7.23 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.3 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu perbandingan peningkatan antara target dengan realisasinya bisa dikatakan baik dari tahun 2015 ke tahun 2016 walaupun pada tingkat persentasenya mengalami penurunan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya dari tahun ke tahun.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu

**Tabel 4.**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu**
**Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 370.100.000,00 | Rp 433.900.000,00 | 117.24 % |
| 2. | 2016 | Rp 467.300.000,00 | Rp 528.200.000,00 | 113.03% |
| 3. | 2017 | Rp 163.500.000,00 | Rp 327.000000,00 | 200.00 % |
| 4. | 2018 | Rp 72.080.000,00 | Rp 45.000.000,00 | 62.43% |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 72.080.000,00 | Rp 17.400.000,00 | 24.14 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.4 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu perbandingan peningkatan antara target dengan realisasinya bisa dikatakan baik dari tahun 2015 ke tahun 2016 walaupun pada tingkat persentasenya mengalami penurunan dan kenaikan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya dari tahun ke tahun. Untuk target pencapaian penerimaan sektor retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 pada triwulan ke II yaitu bulan Juni 2019 mencapai 24,14 % dimana pencapaian target retribusi daerah tersebut kurang optimal dan kurang efektif dalam pemungutan retribusi daerah. Dikatakan kurang optimal karena target pencapaian persentase untuk triwulan ke II kurang dari 40 %.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu

**Tabel 5**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu**
**Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 807.350.000,00 | Rp 796.425.000 ,00 | 98.65 % |
| 2. | 2016 | Rp 639.960.000,00 | Rp 1.088.350.000,00 | 170.07% |
| 3. | 2017 | Rp 639.960.000,00 | Rp 424.480.000,00 | 66.33 % |
| 4. | 2018 | Rp 455.752.000,00 | Rp 539.887.600,00 | 118.46 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 501.327.200,00 | Rp 139.990.000,00 | 27.92 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.5 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu perbandingan peningkatan antara target dengan realisasinya bisa dikatakan baik dari tahun 2015 ke tahun. Dari data tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian retribusi daerah dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 tingkat pencapaian realisasi mengalami kenaikan dan penurunan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

**Tabel 6**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 8,206.399,00 | Rp 32.138.000,00 | 391.62 % |
| 2. | 2016 | Rp 30.000.000,00 | Rp 139.871.000,00 | 466.24% |
| 3. | 2017 | Rp 30.000.000,00 | Rp 88.000.000,00 | 293.33 % |
| 4. | 2018 | Rp 65.000.000,00 | Rp 144.154.500,00 | 221.78 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 60.000.000,00 | Rp 45.317.000,00 | 69.72 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.6 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu perbandingan peningkatan antara target dengan realisasinya bisa dikatakan baik dari tahun 2015 ke tahun 2018 walaupun pada tingkat persentasenya mengalami penurunan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya dari tahun ke tahun. Dari data tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian retribusi daerah dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 tingkat pencapaian realisasi mengalami penurunan tetapi pada dasarnya realisasi tercapai.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

**Tabel 7**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 257.000.000,00 | Rp 221.607.974,00 | 86.22 % |
| 2. | 2016 | Rp 237.500.000,00 | Rp 179.402.244,00 | 75.53 % |
| 3. | 2017 | Rp 237.500.000,00 | Rp 188.537.080,00 | 79.38 % |
| 4. | 2018 | Rp201.297.400,00 | Rp 154.573.645,00 | 76.79 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 201.297.400,00 | Rp 35.026.400,00 | 17.40 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.7 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu mengalami penurunan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya dari tahun ke tahun. Dari data tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian retribusi daerah dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 tingkat pencapaian realisasi mengalami penurunan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

**Tabel 8**
**Target dan Realisasi Penerimaan**
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu**
**Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 199.890.000,00 | Rp 234.543.800,00 | 117.34 % |
| 2. | 2016 | Rp 221.890.000,00 | Rp 190.427.000,00 | 85.82 % |
| 3. | 2017 | Rp 229.905.000,00 | Rp 223.505.000,00 | 97.22 % |
| 4. | 2018 | Rp 242.748.442,00 | Rp 232.361.442,00 | 95.72 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 242.748.442,00 | Rp 67.574.000,00 | 27.84 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

Pada data yang sudah didapat pada tabel 4.8 di atas, juga didapat bahwa Penerimaan Hasil retribusi daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengalami penurunan dan kenaikan persentase penerimaan antara Target dan Realisasinya dari tahun ke tahun. Dari data tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pencapaian retribusi daerah dilihat dari tahun 2015 sampai 2018 tingkat pencapaian realisasi mengalami penurunan dikarenakan besarnya target penerimaan yang ditetapkan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu

**Tabel 9**
**Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan**
**Per Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 s/d 2019 (Dalam Rupiah)**

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015 | Rp 4.089.417.402,00 | Rp 4.252.186.154,00 | 103,98 % |
| 2. | 2016 | Rp 4.581.080.771,00 | Rp 5.022.490.139,00 | 109,64 % |
| 3. | 2017 | Rp 6.027.862.000,00 | Rp 5.495.891.415,00 | 91,17 % |
| 4. | 2018 | Rp 4.629.480.627,00 | Rp 4.100.558.857,00 | 88,57 % |
| 5. | 2019 (Juni) | Rp 5.358.722.627 ,00 | Rp 1.637.032.100,00 | 30,55 % |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu*

*4.2 Pembahasan*

***4.2.1 Efektifitas Retribusi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu***

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tergolong sangat efektif dan baik dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

Adapun Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeliharaan gedung dan berinovasi contoh untuk objek retribusi museum negeri bengkulu agar penerimaan PAD nya meningkat harus melakukan pemeliharaan terhadapa benda-benda pusaka yang ada, membuat inovasi atau kreativitas untuk menarik daya minat pengunjung seperti membuat taman -taman di depan museum agar mempunyai daya tarik pengunjung untuk mengunjungi muse um.

Objek retribusi yang mengalami peningkatan penerimaan PAD adalah objek retribusi sewa aula dan lapangan tennis. Yang menjadi penyebab meningkatnya penerimaan PAD objek tersebut adalah untuk objek sewa aula karena tariff sewa yang lebih terjangkau dibandingkan dengan tariff sewa gedung swasta yang lain sedangkan untuk objek lapangan tennis dikarenakan tersedianya fasilitas yang cukup memadai.

***4.2.2 Efektifitas Retribusi Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu***

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu juga tergolong kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sri Hartati, S.Sos selaku bendahara penerimaan PAD di dapat bahwa pemungutan retribusi di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sangat tidak efektif. Adapun hasil wawancara sebagai berikut : Objek retribusi daerah yaitu Aula yang berlokasi di Panti Jompo KM 9 perlu ditelaah kembali penggunaannya karena aula tersebut tidak layak dijadikan objek untuk memungut retribusi daerah. Kendala dalam pemungutan objek ini adalah tidak adanya daya minat orang untuk menggunakan aula tersebut dikarenakan kurang atau tidak memadai nya sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada.

***4.2.3 Efektifitas Retribusi Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu***

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu juga tergolong kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Silvina Dewi Yani selaku kasubbag keuangan dan Bapak Drs. Ahman Nurdin, MM selaku kepala bidang penempatan dan perluasan kerja di dapat bahwa pemungutan retribusi di Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Bengkulu sudah cukup efektif karena di pungut berdasarkan Peraturan Darah dan Kebijakan yang berlaku. Adapun hasil wawancara sebagai berikut kepada ibu Silvina Dewi Yani : tata cara pemungutan retribusi pada objek retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa laboratorium dan sewa ruangan, wajib retribusi mengisi formulir SPTRD sebagai pemberitahuan untuk menggunakan objek retribusi, staf pengelola membuat SKRD sebagai ketetapan pemakaian retribusi daerah, membuat kwintasi pembayaran sebagai bukti pembayaran selanjutnya staf pengelola merekap dan menyerahkan hasil penerimaan secara berkala tiap akhir bulan ke Bendahara Penerimaan.

### *4.2.4 Efektifitas Retribusi Daerah pada Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu juga tergolong kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Suranto selaku Bendahara Penerimaan di dapat bahwa pemungutan retribusi di Biro Umum, Humas dan Protokol Provinsi Bengkulu sudah cukup efektif karena di pungut berdasarkan Peraturan Darah dan Kebijakan yang berlaku. Adapun hasil wawancara sebagai berikut : pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah gedung serbaguna dan gedung pola provinsi Bengkulu dengan cara wajib retribusi melakukan penentuan jadwal pemakaian gedung dengan mengisi formulir SPTRD, bendahara menyiapkan formulir SKRD yang ditandatangani kepala dinas atau pejabat yang berwenang serta membuat tanda bukti pembayaran sebagai tanda terima pembayaran atas retribusi daerah yang digunakan setelah itu menyetorkan ke Kas Daerah dan membuat laporan bulanan sebagai rekapan penerimaan retribusi daerah. Sedangkan untuk objek retribusi tempat olahraga yaitu lapangan tennis indoor dipungut oleh staf yang ditunjuk dengan menggunakan kwintansi pembayaran setelah itu baru di laporkan ke bendahara penerimaan dan direkap secara berkala.

### *4.2.5 Efektifitas Retribusi Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu juga tergolong efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Heri Denti selaku bendahra penerimaan PAD pemungutan retribusi tersebut sudah dengan mengikuti aturan yang berlaku. Semua objek retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan untuk pendidikan dan umum. Untuk penggunaan pendidikan penerimaan didapat dari kegiatan diklat dan pim yang dilakukan. Untuk umum penerimaan didapat dari sewa gedung yang digunakan oleh pihak lain. Penerimaan retribusi

menggunakan alat bantu pembayaran yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku seperti SKRD dan Kwintansi pembayaran yang sah.

Kendala yang dihadapi untuk penerimaan PAD tergantung dengan ada tidak nya kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat yang diselenggarakan oleh kabupaten kota). Upaya dalam meningkatkan penerimaan PAD dengan meningkatkan tariff sewa, meningkatkan fasilitas, dan meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Objek retribusi daerah yang mengalami peningkatan penerimaan adalah retribusi tempat penginapan/villa dari sewa ruang karena banyak yang menggunakan sewa kamar untuk penginapan para jamaah haji. Sedangkan Objek retribusi daerah yang mengalami penurunan penerimaan adalah objek lain- lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan dari penyelenggaran pendidikan dan pelatihan.

Evaluasi yang dilakukan terkait penerimaan PAD yaitu dengan melakukan koordinasi mengenai kegiatan pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan PAD serta dengan melakukan monitoring setiap bulannya. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dengan mencari peluang agar kegiatan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan lancar dan meninggkatkan kegiatan yang menunjang penerimaan PAD dengan mengadakan diklat. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa penerimaan retribusi daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu tergolong efektif.

### *4.2.6 Efektifitas Retribusi Daerah pada Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu juga tergolong sangat efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aryanti selaku bendahara penerimaan PAD pemungutan retribusi penggatian cetak peta dengan cara wajib retribusi membuat surat permohonan untuk mendapat izin cetak peta. Yang dimaksud wajib retribusi disini adalah perusahaan-perusahaan (PT) atau perorangan. Setelah surat permohonan diterima peta yang dicetak dibuat kwintansi pembayaran sebagai tanda bukti pembayaran, dan semua penerimaan direkap dan disetorkan ke kas daerah.

### *4.2.7 Efektifitas Retribusi Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu juga tergolong kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Titin Erna Juwita, SE selaku kasubbag keuangan didapat bahwa pemungutan retribusi daerah untuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa aula dipungut berdasarkan pemohon/wajib retribusi dalam menggunakan aula, pemohon mengisi formulir SPTRD, menetukan tanggal penggunaan

aula, setelah itu bendahara membuat SKRD dan membuat kwintasi pembayaran. Untuk objek BBIPP Kelobak dengan menjual benih bersetifikasi seperti padi, jagung, umbi -umbian sesuai permintaan pasar. Pada objek BBI Holtikultura Talang aling dengan menyiapkan benih-benih holtikulutura seperti buah-buahan mangga, jeruk dan lain-lain, benih bersertifikat dengan pengadaan batang bawah kemudian mengevolusi dengan entres pohon induk lalu dipasarkan.

### *4.2.8 Efektifitas Retribusi Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu juga tergolong kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fero Brama Y, SH, MM selaku tim PAD didapat bahwa pemungutan retribusi daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut ini : untuk objek retribusi pelayanan kepelabuhan yaitu jasa pas masuk kendaraan bermotor pelabuhan perikanan dipungut dengan menggunakan karcis sebagai alat pembayaran yang sah sedangkan untuk jasa sewa gudang pelabuhan dan retribusi penjualan produksi usaha daerah pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD dan Kwintasi pembayaran yang sah.

### *4.2.8 Efektifitas Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu*

Adapun dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu, didapatlah bahwa tingkat pemungutan retribusi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu tergolong cukup efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan beberapa narasumber dan dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sebagai koordinator dalam pemungutan retribusi daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Memungut Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Retribusi Daerah dalam 3 Golongan Retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk total pencapaian target penerimaan sektor retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 pada triwulan ke II yaitu bulan Juni 2019 mencapai 30,55 % dimana pencapaian target retribusi daerah tersebut tergolong cukup efektif dalam pemungutan retribusi daerah karena seharusnya target pencapaian persentase untuk triwulan ke II mencapai 40 %.

## 5. KESIMPULAN, DAN SARAN

### *5.1 Kesimpulan*

Berdasarkan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian pada delapan (8) Organisasi Perangkat Daerah Pemungut PAD sektor retribusi daerah provinsi Bengkulu mengenai Ektifitas Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu dan dengan adanya data penerimaan retribusi daerah serta dari hasil

wawancara yang telah dilakukan disetiap dinas terkait. Maka, bisa dikatakan bahwa pemungutan retribusi daerah pada organisasi perangkat dearah wilayah provinsi Bengkulu tergolong cukup efektif. Adapun faktor-faktor penyebab tingkat efektifitas penerimaan ini adalah sebagai berikut:

a. Kualitas pegawai pada dinas terkait yang memadai.
b. Efektifnya tata cara pemungutan retribusi daerah pada dinas terkait.
c. Pegawai/staf yang memiliki kualitas kerja yang tinggi.
d. Tata cara pemungutan retribusi yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang berlaku.
e. Adanya keterlibatan pimpinan masing-masing dinas secara aktif memantau berjalannya aktifitas retribusi daerah di wilayah provinsi Bengkulu.
f. Adanya kerjasama sebagai tim yang kompak sehingga tidak mengalami kendala yang berarti dalam hal pelaporan dan penyetoran retribusi daerah di dinas terkait

### *5.2 Saran*

***a)*** Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, sebaiknya meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan atau berkala, meningkatkan proses pengawasan, penerapan sangsi terhadap penunggak penyetoran serta meningkatkan pembayaran retribusi dan pelayanan yang diberikan oleh ke tujuh belas organisasi perangkat daerah yang terkait.

***b)*** Penelitian berikutnya disarankan adanya kajian baru terhadap implementasi pemungutan retribusi daerah dan kualitas pelayanan dengan melibatkan beberapa variabel, seperti keterlibatan manajemen dengan cakupan pada dinas yang lebih luas di wilayah Provinsi Bengkulu.

***c)*** Untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai objek retribusi daerah, agar lebih memaksimalkan pemungutan retribusi daerah agar penerimaan PAD sektor retribusi daerah dapat meningkat.

***d)*** Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih teliti, spesifik, dan akurat dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Sektor Publik :*Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 dan Edisi 4 Jakarta, Salemba Empat

Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud.*

Bungkaes, et.al.2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud*. Manado, Universitas Sam Ratulangi.

Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010).

Mahmudi, 2007.*Manajemen Kinerja Sektor Publik,* Yogyakarta Indonesia

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2018*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Retribusi Perizinan Tertentu*

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rertibusi Jasa Umum*

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung; Alfabeta

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung; Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan PertanggungjawabanAPBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Malang.